

**EKSISTENSI MARGA KARTAMULIA DESA JAMBU KECAMATAN
GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM PADA MASA
PEMERINTAHAN DEPATI YUNI TAHUN 1846-1856**

SKRIPSI

**OLEH
EKA YOSI
NIM 352010106**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
AGUSTUS 2014**

**EKSISTENSI MARGA KARTAMULIA DESA JAMBU KECAMATAN
GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM PADA MASA
PEMERINTAHAN DEPATI YUNI TAHUN 1846-1856**

SKRIPSI

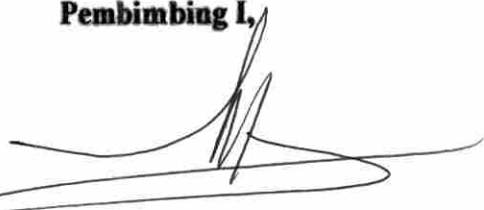
**Diajukan Kepada
Universitas Muhammadiyah Palembang
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Pendidikan**

**Oleh
Eka Yosi
NIM 352010106**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
Agustus 2014**

Skripsi oleh Eka Yosi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

**Palembang, 21 Agustus 2014
Pembimbing I,**



Drs. H. M. Alimansyur

**Palembang, 21 Agustus 2014
Pembimbing II,**



Dra. Nurhayati Dina, M.Pd.

Skripsi oleh Eka Yosi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji Pada tanggal 23 Agustus 2014

Dewan Penguji :



Drs. H. M. Alimansyur, Ketua



Dra. Nurhayati Dina, M.Pd., Anggota



Dra. Fatmah, Anggota

**Mengetahui
Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah,**



Heryati, S.Pd., M.Hum.

**Mengesahkan
Dekan
FKIP UMP,**



Drs. Syaifudin, M.Pd.

Motto

- *"Jadilah seperti sang mentari yang selalu berguna bagi semua makhluk hidup di bumi dari fajar hingga senja menyingsing".*
- *"Keridhaan Allah (terhadap hambanya) tergantung pada keridhaan ibu bapaknya dan murka Allah pun terletak pada murka kedua ibu bapaknya".*

(H. R. Al-Hakim)

Kupersembahkan kepada:

- ♥ *Allah SWT atas nikmat yang tiada henti telah diberikan-Nya.*
- ♥ *Ayahanda tercinta Marzuki dan Ibunda tersayang Farida yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus dan tak henti-hentinya memanjatkan do'a demi menantikan keberhasilan dan kesuksesanku.*
- ♥ *Kakakanda Emil Subianto, Ari Afriadi, Ayunda Milli Yuli Hartika S, Pd. terima kasih telah memberikan motivasi kepadaku.*
- ♥ *Arez Triono A.Md yang selalu menemani, mendoakan dan memberikan ku dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ♥ *Teman-teman ku Irma, Dinni, Lia, Shinta, Rani, Orin, Yuk Eni, Yuk Ceng, kak Andi, kak Hery, kak Rolin, Abdul, yang selalu menghadirkan semangat, canda tawa dalam kebersamaan kita.*
- ♥ *Teman-teman Angkatan 2010 Kelas C*
- ♥ *Teman-teman PPL SMP Negeri 14 Palembang*
- ♥ *Teman-teman KKN Posko 374 Desa Tanjung Terang Muara Enim*
- ♥ *Agama dan almamater kebanggaanku.*

ABSTRAK

Yosi, Eka. 2014. *Eksistensi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada Masa Pemerintahan Depati Yuni tahun 1846-1856*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Sarjana (S1), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pembimbing: (I) Drs. H. M. Alimansyur, (II) Dra. Nurhayati Dina, M.Pd.

Kata Kunci: Eksistensi, Marga Kartamulia, Pemerintahan, Depati Yuni.

Penelitian ini **dilatarbelakangi** oleh keinginan penulis untuk mengetahui eksistensi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada masa pemerintahan Depati Yuni tahun 1846-1856. **Rumusan masalah:** (1) bagaimana hubungan marga Kartamulia pada masa pemerintahan Depati Yuni terhadap pemerintahan Pusat (Palembang)?, (2) bagaimana eksistensi marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?, (3) bagaimana sistem pemerintahan marga Kartamulia Desa Jambu Kabupaten Muara Enim?, dan (4) bagaimana pengaruh pemerintahan Depati Yuni terhadap kehidupan masyarakat marga Kartamulia Desa Jambu Kabupaten Muara Enim?. **Metode** yang digunakan deskriptif dengan **jenis penelitian** kualitatif. **Kesimpulan:** (1) Hubungan Marga Kartamulia pada masa pemerintahan Depati Yuni terhadap pemerintahan pusat (Palembang), secara fungsional Marga Kartamulia memainkan peranan yang sangat penting bagi kehidupan dan sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat memberikan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pusat untuk dijalankan oleh Marga Kartamulia, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan di pusat. Pemberian dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Marga Kartamulia dalam menetapkan anggaran belanja daerah tidak menyangkut kewenangan dalam penetapannya. Marga Kartamulia melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat untuk menutup kekurangannya. Meskipun begitu, jumlah subsidi yang diberikan akan ditetapkan pada batas-batas tertentu oleh pemerintah pusat. Marga Kartamulia menetapkan anggaran belanja dan menggali sumber keuangan untuk membiayai anggaran belanjanya. Kemudian sisa belanja yang tidak tertutup oleh sumber keuangan Marga Kartamulia ditanggung oleh pusat. (2) Eksistensi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim masih berjalan. Hal ini dibuktikan sebagian besar masyarakat wilayah Marga Kartamulia tinggal di Desa Jambu sudah dapat mengetahui bahwa Marga Kartamulia memiliki lembaga sendiri, perangkat hukum, dan acuan yang jelas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, serta tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak luar, karena memang marga Kartamulia dapat melakukan segala sesuatunya sendiri, (3) Sistem pemerintahan Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim berdasarkan garis keturunan. Apabila Ketua marga meninggal dunia, maka anak atau keturunannya yang meneruskan kepemimpinan marga tersebut, 4) Pemerintahan Depati Yuni sangat berperan dalam beberapa bidang, yaitu ekonomi, politik, sosial dan budaya. **Saran:** (1) Bagi Penulis Lanjutan, agar hasil penelitian dapat dijadikan referensi dalam penulisan tentang eksistensi marga-marga yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, (2) Bagi Mahasiswa, hendaknya lebih mengenal marga-marga yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. (3) Bagi Lembaga Pendidikan, hendaknya menyiapkan buku-buku tentang marga-marga di Sumatera Selatan untuk menambah wawasan mahasiswa dalam pemahaman marga-marga yang ada di Sumatera Selatan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT berkat rahmat dan ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul *“Eksistensi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Pada Masa Pemerintahan Depati Yuni Tahun 1846-1856”*.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang ikut serta membantu dan memberikan masukan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat:

1. Drs. Syaifudin, M.Pd., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Heryati, S.Pd., M.Hum., Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Drs. H. M. Alimansyur, Pembimbing I selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang yang memberikan arahan dan senantiasa dengan sabar membimbing dan terus memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
4. Dra. Nurhayati, M.Pd., Pembimbing II selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang

yang memberikan arahan dan senantiasa dengan sabar membimbing dan terus memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.

5. Seluruh Dosen serta Karyawan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepala Desa dan masyarakat Dusun Jambu Kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan.
7. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Marzuki dan Ibunda Farida, saudara-saudaraku yang telah memotivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman FKIP Sejarah Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.

Atas segala bantuan yang diberikan, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, Amin. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Harapan dari penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Agustus 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Definisi Istilah	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Eksistensi, Marga, Desa, dan Depati	12
1. Pengertian Eksistensi	12
2. Pengertian Marga	13
3. Pengertian Depati	14
B. Sejarah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	16
C. Kondisi Kehidupan Politik, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat Marga Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	20
1. Kondisi Kehidupan Politik Masyarakat Marga Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	21
2. Kondisi Kehidupan Ekonomi Masyarakat Marga Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	23
3. Kondisi Kehidupan Budaya Masyarakat Marga Kartamulia Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	24

a. Peralatan dan Perlengkapan Hidup	26
b. Sistem Mata Pencaharian	27
c. Sistem Kekerabatan	28
d. Adat Perkawinan	29
e. Organisasi Sosial	31
f. Bahasa	32
g. Stratifikasi Sosial	33
h. Kesenian	35
i. Kehidupan Beragama	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metodologi Penelitian	38
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
1. Pendekatan Penelitian	42
a. Pendekatan Geografi	42
b. Pendekatan Sosiologi	43
2. Jenis Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	44
D. Kehadiran Peneliti	45
E. Sumber Data	46
F. Prosedur Pengumpulan Data	47
1. Observasi	48
2. Dokumentasi	49
3. Wawancara	50
G. Teknik Analisis Data	51
1. Interpretasi	52
2. Historiografi	52
3. Analisis Data Angket	55
H. Tahap-tahap Penelitian	55
1. Persiapan Penelitian	55
2. Pelaksanaan Penelitian	57

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL TEMUAN

A. Deskripsi Data Observasi dan Hasil Temuan	59
B. Deskripsi Data Dokumentasi dan Hasil Temuan	60
C. Deskripsi Data Wawancara dan Hasil Temuan	63
D. Deskripsi Data Angket dan Hasil Temuan	71

BAB V PEMBAHASAN

A. Hubungan Marga Kartamulia pada Masa Pemerintahan Depati Yuni terhadap Pemerintahan Pusat (Palembang)	75
B. Eksistensi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	78
C. Sistem Pemerintahan Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim	81
D. Pengaruh Pemerintahan Depati Yuni Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya	84
1. Bidang Ekonomi	85
2. Bidang Politik	85
3. Bidang Sosial	85
4. Bidang Budaya	87

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	89

DAFTAR RUJUKAN	91
-----------------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Data Informan	50
3.2 Tahap-tahap Penelitian	58
4.1 Nama-nama Masyarakat Desa Jambu yang Menjadi Sampel Penelitian	61
4.2 Hasil Wawancara Narasumber Pertama	64
4.3 Hasil Wawancara Narasumber Kedua	66
4.4 Hasil Wawancara Narasumber Ketiga	69
4.5 Rekapitulasi Data Angket	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Keterangan Pertanggungjawaban Penulisan Skripsi	94
2. Persetujuan Skripsi	95
3. Surat Keputusan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang ...	96
4. Usul Judul dan Pembimbing Skripsi	97
5. Undangan Simulasi Proposal	98
6. Daftar Hadir Simulasi Proposal Penelitian	99
7. Halaman Pengesahan Proposal Penelitian	100
8. Laporan Kemajuan Bimbingan Skripsi	101
9. Gambar Penelitian di Lapangan	106
10. Surat Permohonan Riset	109
11. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset	110



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad ke-16, di Palembang terdapat sebuah kerajaan yang terkenal dengan nama Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan Palembang Darussalam sendiri secara resmi diproklamkan oleh Pangeran Ratu Kemas Hindi Sri Susuhanan Abdurrahman Candiwalang Khalifatul Mukminin Sayidul Iman atau lebih dikenal Ki Mas Hindi atau Sunan Cinde Walang sebagai Sultan Pertama (1659-1706), terlepas dari pengaruh Kerajaan Mataram (Jawa) dan menyatakan diri sebagai sultan, setara dengan Sultan Agung di Mataram. "Corak pemerintahannya pun diubah condong ke corak Melayu dan lebih disesuaikan dengan ajaran agama Islam" (Anatashia, 2013:2).

Tahun 1821 Keraton Kuto Lamo diserang oleh Belanda dan tanggal 7 Oktober 1823, Reguting Commisaris Belanda J.L. Van Seven House diperintahkan membongkar habis untuk menghilangkan monumental Kesultanan Palembang demi membalas dendam atas dibakarnya loji Sungai Aur oleh Sultan Mahmud Badaruddin I pada tahun 1811. Bangunan ini dibangun kembali (1825) yang selanjutnya dijadikan komisariat Pemerintah Hindia Belanda untuk Sumatera Bagian Selatan sekaligus sebagai kantor Residen.

Residen tersebut terdiri dari beberapa pemerintahan administratif, yang salah satunya adalah Bumi Serasan Sekundang. Serasan Sekundang adalah sebutan populer Muara Enim, marga sebagai komunitas adat bermukim dan hidup dengan masih

mengacu pada pranata adat yang diwarisi. Eksistensi kelembagaan adat di Muara Enim dapat diukur dari sejauh mana keberadaan dan “fungsi hukum-hukum adat dalam mengatur hubungan kemasyarakatan; seperti adat hak waris, pernikahan, gotong-royong, penyelesaian konflik antarwarga adat, nilai-nilai penghargaan etnis pendatang, serta tata-cara menjaga wilayah tanah-kedaulatan-masyarakat adat” (Disbudpar, 2012 : 10).

Marga telah menempuh perjalanan sejarah yang panjang dan berliku. Semenjak masa prakolonial, kolonial Belanda, Jepang, dan Republik Indonesia, berlanjut ke masa post-kolonial; masa kepemimpinan Soekarno dan jaman Orde Baru; hingga masa demokratisasi dan desentralisasi kini yang masih berlangsung. Sepanjang babak-babak sejarah tersebut, eksistensi dan peran marga tidak luput dari kondisi pasang-surut sebagai institusi tradisional yang berpengaruh terhadap komunitas adatnya (Irwanto, 2011: 34).

Pada mulanya eksistensi marga sebagai institusi adat di Sumatera Selatan relatif kuat di berbagai jaman (prakolonial, masa kolonial, dan pascakemerdekaan). Dilihat dari desain struktur dan spirit nilai yang dibangun di dalamnya, marga menjadi lembaga yang mencerminkan praktek demokrasi secara otentik di level grassroot. Lembaga ini memiliki kapasitas ekonomi menghidupi warganya secara mandiri, berbasiskan tanah sebagai hak ulayat, yang dikelola untuk memproduksi dan distribusi secara fungsional bagi kemakmuran marga. Sementara “Hak politik marga diwujudkan dalam otonomi mengatur pemerintahannya dan menjalankan sistem, kekuasaan baik secara internal maupun eksternal” (Hanafiah, 1980 : 42).

Semenjak terjadi pergeseran struktur kekuasaan di jaman kolonial sampai pascakemerdekaan, marga selalu menjadi institusi strategis yang dimanipulasi oleh rezim penguasa sebagai alat dan media mempengaruhi dinamika masyarakat sipil. Lama-kelamaan eksistensi dan fungsi kemandirian marga mulai pudar, terutama semenjak era Orde Baru, yakni akibat atau pengaruh langsung kebijakan birokratisasi, korporatisasi, dan kapitalisasi.

Pada tanggal 1 Desember 1979 diterbitkan dan disahkan regulasi baru yakni Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Watak regulasi ini cenderung mengarah pada homogenisasi bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional. “Terjadi konversi marga ke dalam struktur desa yang merupakan model pengorganisasian masyarakat menurut sistem di Jawa. Pada titik inilah awal mula birokratisasi dan eksploitasi adat secara besar-besaran” (Irwanto, 2011 : 63).

Semenjak kooptasi dioperasikan, maka ruang gerak marga menjadi sangat terbatas. Pemanfaatan adat untuk kepentingan mobilisasi demi mendukung rezim Orde Baru terjadi secara besar-besaran, bahkan cenderung menegasi peran sebelumnya. “Marga, yang pada mulanya secara otonom memiliki legitimasi dari masyarakat, perannya kian terdistorsi oleh rekayasa negara” (Disbudpar, 2012 : 13).

Perombakan politik adat ini menyebabkan krisis substansial marga di masyarakat, kemudian meluas pada sisi ekonomi. “Penguasaan hak-hak ekonomi (seperti tanah ulayat milik marga) dianeksasi pemerintah melalui Pemerintah Desa (Pemdes) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk diekstraksi, eksploitasi,

dan kapitalisasi. Kekayaan marga mulai hilang dan krisis pengakuan masyarakat terhadap marga juga terjadi” (Irwanto, 2011 : 65).

Otoritas marga semakin tergerogoti dengan adanya mobilisasi pendudukan sumber daya lokal melalui transmigrasi, tanpa dibarengi strategi negosiasi dalam kesadaran pluralisme. Tidak heran jika melalui transmigrasi ini sebagian masyarakat lokal menganggapnya sebagai ancaman ekonomi-politik mengenai penguasaan sumber daya lokal. Seringkali yang disalahkan adalah transmigrannya. Padahal, transmigrasi ini merupakan alat pemerintah Orde Baru untuk menundukkan komunitas lokal.

Dapat disimpulkan, risiko besar proses birokratisasi dan kapitalisasi adalah hilangnya peran substansial adat sebagai *civil society organization* dalam sektor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Marga sebagai *local institution* yang dipimpin oleh Pasirah, yang dulunya dianggap efektif menjalankan *social order*, dimana komunitas lokal (struktur sosial, ekonomi, dan budaya) yang terbangun secara integratif, mulai kehilangan legitimasinya.

Kota Muara Enim, berada sekitar 400 KM dari Kota Palembang. Kota ini sekaligus menjadi ibukota Kabupaten Muara Enim. Wilayahnya dibelah dua sungai; Sungai Lematang (yang mengalir dari arah Bengkulu) dan Sungai Ogan (yang mengalir dari arah Lampung). Kedua sungai itu bertemu dan membentuk semacam muara, serta menyatu dalam Sungai Enim. Sungai Enim ini merupakan salah satu anak Sungai Musi di Kota Palembang. Dengan demikian “Wilayah Kabupaten Muara

Enim merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dialiri tiga sungai, yaitu Sungai Lematang, Sungai Ogan, dan Sungai Enim (Disbudpar, 2011 : 14).

Pada masa pendudukan Hindia Belanda, saat struktur pemerintahan di daerah masih berbentuk Marga, di sepanjang aliran tiga sungai itu terdapat beberapa pemerintahan marga. Di jalur Sungai Enim misalnya meliputi Marga Tamblang Ujan Mas sampai Marga Sungai Rotan. Sedangkan di sepanjang Sungai Lematang meliputi Marga Semendo sampai Marga Tamblang Patang Puluh Bubung. Semuanya bergabung dalam Wilayah Administratif *Onder Afdeling Lematang Ilir*. “Kabupaten Muaraenim berada dan tunduk pada *Afdeling Palembang Sche Boven Landen* dengan dipimpin seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat” (Irwanto, 2011 : 71).

Asisten Residen selain membawahi wilayah *Onder Afdeling Lematang Ilir* juga membawahi *Onder Afdeling Lematang Ulu* dengan Ibukota Lahat, *Onder Afdeling Tebing Tinggi* dengan Ibukota Tebing Tinggi dan *Onder Afdeling Pasemah* dengan Ibukota Pagaralam. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah *administrative Onder Afdeling* berganti nama menjadi Kewedanaan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Saat itu wilayah-wilayah marga dibagi dalam dua wilayah Kewedanaan, yaitu Kewedanaan Lematang Ogan Tengah, dan Kewedanaan Lematang Ilir.

Kewedanaan Lematang Ogan Tengah dengan wilayah meliputi:

Marga Rambang Niru, Marga Empat Petulai Curup, Marga Empat Petulai Dangku, Marga Sungai Rotan (yang sebelumnya marga-marga ini masuk wilayah Lematang Ilir), Marga Rambang Kapak Tengah, Marga Lubai Suku Satu, Marga Lubai Suku Dua (sebelumnya masuk wilayah Ogan Ulu), Marga Alai, Marga Lembak, Marga Kartamulya, Marga Gelumbang, Marga Tambangan Kelekar (sebelumnya masuk

wilayah Ogan Ilir) serta Marga Abab dan Marga Penukal (sebelumnya masuk wlayah Sekayu) (Hasbullah, 1996 : 103).

Sementara itu, Kewedanaan Lematang Ilir meliputi:

Marga Semendo Darat, Marga Panang Sangang Puluh, Marga Panang Selawi, Marga Panang Ulung Puluh, Marga Lawang Kidul, Marga Tamblang Karang Raja, Marga Tamblang Patang Puluh Bubung dan Marga Tamblang Ujan Mas. Setiap marga di bawah kepala pemerintahan bernama Pasirah. Pada masa kemerdekaan, berdasarkan sidang Dewan Keresidenan Palembang Tanggal 20 Nopember 1946, Wilayah Kewedanaan Lematang Ilir dan Lematang Ogan Tengah digabung menjadi Kabupaten Lematang Ilir Ogan Tengah disingkat LIOT dengan Ibukota Muara Enim (Disbudpar, 2011 : 20).

Berdasarkan SK Bupati Kdh Tk II LIOT Nomor 47/Deshuk/1972 Tanggal 14 Juni 1972 ditetapkan Tanggal 20 Nopember 1946 sebagai Hari Jadi Kabupaten Muara Enim Lalu berdasarkan SK Bupati Tingkat II Muara Enim Nomor 2642/B/1980 Tanggal 6 Maret 1980, terhitung Tanggal 1 April 1980 nama Kabupaten LIOT dikembalikan pada nama semula yaitu Kabupaten Tingkat II Muara Enim, hal mana telah tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74: Tambahan LNRI Nomor 1821) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat di atas sebagai Undang-Undang (Arsip Pemerintahan Kabupaten Muara Enim, 2011).

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tersebut pula Muara Enim ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan nama Kabupaten daerah Tingkat II Muaraenim dengan batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tanggal 20 Maret 1950 Nomor Gb/100/1950. Lalu berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tentang Pemerintahan Daerah, sebutan kabupaten daerah Tingkat II Muara Enim berubah menjadi Kabupaten Muaraenim (Kata Muara Enim disambung).

Penelitian terkait dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Harry Truman tahun 2007, mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Ilmu Politik, Kosentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, UGM, Yogyakarta dan Staf Peneliti pada Kajian Politik dan Pembangunan Kawasan, *Center for Humanity and Civilization Studies* (CHOICES) dengan judul *Sistem Marga Di Sumatera Selatan: Revitalisasi Sistem Marga Wujud Demokrasi Lokal*. Berdasarkan penelitian Harry Truman dapat disimpulkan sistem pemerintahan marga secara utuh sebagai *self-governing community* memang tidak bisa diterapkan lagi pada tingkat pemerintahan terendah di Sumatera Selatan. Karena dalam sistem marga, Pasirah (pemimpin marga) menjalankan fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau itu diterapkan dalam situasi sekarang, jelas tidak mungkin. Situasi sosial masyarakat saat ini juga sangat berbeda dengan kondisi saat marga masih berlaku.

Selanjutnya, penelitian lain oleh Arlan Ismail tahun 1998 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang dengan judul *Marga Di Bumi*

Sriwijaya: Sistim Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian Arlan Ismail dapat diketahui bahwa sistim kemargaan di daerah dataran tinggi Pasemah, kesatuan masyarakat yang bersendikan asas turunan sedarah disebut *Sumbay*, dipimpin oleh seseorang disebut *Pase-Lurah* (Pasirah) yang tunduk pada musyawarah para pemimpin *Sosokan*. *sosokan* adalah bagian dari *sumbay* dipimpin oleh *Jurai-Tua*, inilah cikal bakal *Dewan Marga*. Untuk sistim kemargaan di daerah dataran tinggi Rejang kesatuan masyarakat yang bersendikan asas turunan sedarah disebut *Petulai* dipimpin oleh seseorang disebut *Depati*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Eksistensi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim Pada Masa Pemerintahan Depati Yuni Tahun 1846-1856*, sebagai laporan akhir untuk mencapai gelar sarjana di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang.

B. Pembatasan Masalah

Untuk lebih mempertajam pembahasan peneliti membatasi masalah tentang *eksistensi Marga Kanamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim pada masa pemerintahan Depati Yuni tahun 1846-1856* berdasarkan skop spatial dan temporal. **Skop spatial (tempat)** pada penelitian ini adalah keberadaan marga Kartamulya Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupten Muara Enim. Sedangkan **skop temporal (waktu)** diambil pada kurun waktu 1846–1856

dikarenakan pada masa itu di Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dipimpin oleh Depati Yuni.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pokok pemikiran yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hubungan Marga Kartamulia pada masa Pemerintahan Depati Yuni terhadap pemerintahan Pusat (Palembang)?
2. Bagaimana eksistensi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?
3. Bagaimana sistem pemerintahan Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?
4. Bagaimana pengaruh pemerintahan Depati Yuni terhadap kehidupan masyarakat Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hubungan Marga Kartamulia pada masa Pemerintahan Depati Yuni terhadap pemerintahan Pusat (Palembang).
2. Untuk menjelaskan eksistensi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.
3. Untuk mendeskripsikan sistem organisasi Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

4. Untuk mengungkapkan pengaruh pemerintahan Depati Yuni terhadap Kehidupan masyarakat Marga Kartamulia Desa Jambu Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

E. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan wawasan luas mengenai eksistensi Marga Kartamulia pada masa pemerintahan Depati Yuni tahun 1846-1856.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang eksistensi Marga Kartamulia pada masa pemerintahan Depati Yuni tahun 1846-1856.
3. Secara akademis, penelitian ini memberikan sumbangan bagi ilmu Sejarah yaitu eksistensi Marga Kartamulia pada masa pemerintahan Depati Yuni tahun 1846-1856.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menerangkan berbagai istilah-istilah yang tidak dimengerti. Oleh karena itu, penulisan ini disertai daftar istilah. Sesuai *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1988) serta *Ensikiopedia Nasional Indonesia* oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1990):

Adat : Gagasan kebudayaan yang terdiri dan nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah.

Depati : Jabatan dalam pemerintahan masa kolonial Hindia Belanda

- Desa* : Suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.
- Eksistensi* : Keberadaan atau keadaan
- Marga* : Nama-nama keluarga yang menghubungkan kekerabatan
- Under Afdeling* : Wilayah administratif yang diperintah oleh seorang kontrolir (wedana bangsa Belanda) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
- Kabupaten* : Pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati.
- Kecamatan* : Pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah kabupaten, yang dipimpin oleh seorang Camat.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Makmun. 1987. *Sejarah Perjuangan Revolusi di Sumatera Selatan*. Palembang : Proyek Kanwil Depdikbud Sumatera Selatan.
- Anitashiva. 2013. *Sumatera Selatan dalam Angka*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959. *Tentang Arsip Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2011*.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Muara Enim Tahun. 2011.
- Irwanto, Dedi. 2011. *Venesia Dan Timur*. Yogyakarta: Ombak.
- Hanafiah, Djohan. 1980. *Guguk, Lembaga Sosial Ekonomomi di Kota Palembang pada Abad ke-18 dan ke-19*, Majalah Jambatan: Tijdschrift voor de Geschiedenis van Indonesia. Amsterdam : Jaargang 7, nummer 2.
- Hasbullah, Jousairi. 1996. *Mamang dan Belanda : Goresan-goresan Wajah Sosial Ekonomi dan Kependudukan Sumatera Selatan Zaman Kolonial dan Refleksi pada Han ini*. Palembang : Unsri.
- Lembaran Negara Republik Indonesia—LN RI, Tahun 1956.
- Mahsun. 2007. *Metode Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marsden, William. 1996. *The History of Sumatra*. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
- Nawawi, Hadarwi. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistik*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif/ kualitatif/ dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Usman, Husaini. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardiyanta. 2007. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Gelumbang>, Muara Enim
- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos.
- Alistina, Vrima. 2012. *Pemikiran Mohammad Natsir Terhadap Kondisi Politik Indonesia Tahun 1948-1959*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang. Program Sarjana (S1), FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Arif, Muhammad. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widya.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2007. *Profil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan* (Online), ([http://keadaan geografis kabupaten OKU Selatan](http://keadaan-geografis-kabupaten-OKU-Selatan) diakses 29 November 2013).
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Depdikbud. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Diana, Meri Citra. 2012. *Pembangunan Jembatan Ampera Di Kota Palembang Pada Tahun 1960-1965 Suatu Tinjauan Histori*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang. Program Sarjana (S1), FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Dokumen Desa Uludanau. 2013
- Dzulfikriddin. 2001. *Kepemimpinan Meraje Dan Kesesuaian Dengan Kepemimpinan Dalam Islam*. Palembang : Pustaka Auliya.

- Edwin. 2010. *Pengertian adat tunggu tubang*(Online), ([http://pengertian adat tunggu tubang](http://pengertian-adat-tunggu-tubang) diakses 17 november 2013 pukul 20:01 WIB).
- Hens.A.M. 1987. *adat dan Oendang-Oendang Oeasli di Sumatera Selatan*. Tebing Tinggi.
- Ismail,M.Arlan. 2004.*Marga di Bumi Sriwijaya*. Palembang:Unanti Press Palembang.
- Kepala pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendidikan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Koentjaraningrat. 1993. *Hubungan antara antropologi sosial dan sosiologi*, Jakarta : UI Press.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Santun,Dedi Irwanto M. dkk.2010.*Iliran danUluan Dikotomi dan Dinamika Dalam Sejarah Kultural Palembang*.Yogyakarta: Eja Publisher.
- Santun Dedi Irwanto Muhammad. 2011. *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Ombak.
- Silitonga.2008. *Leluhur Marga Marga Batak* (Online), ([http//pengertian marga](http://pengertian-marga), diakses 28 November 2013 pukul 21:34).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto. 2013. *Pelayarandan Perdagangan di Pelabuhan Palembang*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. *UUD 1945 dan Amandemennya*. Solo:Sendang Ilmu.
- Ismail, Arlan. 1988. *Marga Di Bumi Sriwijaya: Sistim Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang. Ogan Ilir: Inderalaya.